

SKRIPSI

**ANALISIS PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
PADA KANTOR BUPATI ENREKANG**

**NURALAM T
10573 02528 11**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : **Analisis Pengawasan Keuangan Terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran Pada Kantor Bupati Enrekang**

Nama Mahasiswa : **Nuralam.T**

Stambuk : 105730252811

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

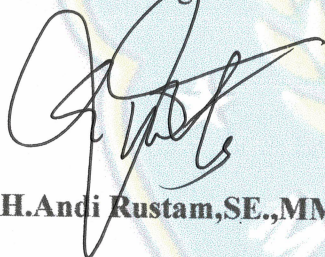
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, pada Hari Senin, 12 Februari 2018.

Makassar, 15 Februari 2018

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr.H.Andi Rustam,SE.,MM.Ak.CA.CPA

Pembimbing II



Ismail Badollahi,SE.M.Si.Ak.CA

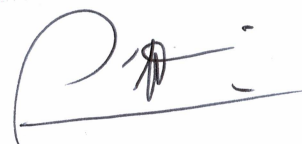
Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi



Ismail Rusulung, SE, MM
NBM : 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Badollahi SE,M.Si.Ak.CA

NBM : 1073428

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah di sahkan oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Surat Keputusan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan No. 0017 / 2018 Tahun 1439 H/ 2018 M yang di pertahankan di depan tim penguji pada hari Senin, 12 Februari 2018 M sebagai persyaratan guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (SE)** oleh **Nuralam.T Nim 105730252811** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

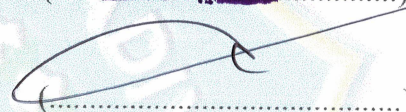
Makassar, 15 Februari 2018

Panitia Ujian :

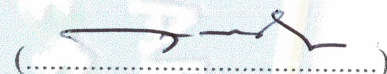
Pengawasan Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar)


(.....)

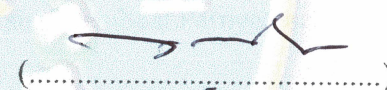
Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)


(.....)

Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)


(.....)

Penguji : 1. Drs. H. Sultan Sarda, MM


(.....)

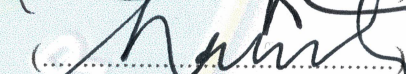
2. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA


(.....)

3. Samsul Rizal, SE.,MM


(.....)

4. Drs. Hamzah Limpo, M.Si


(.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nuralam.T**
NIM : 10573 02528 11
Program Studi : Akuntansi
Judul skripsi : **Analisis Pengawasan Keuangan Terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran Pada Kantor Bupati Enrekang**

Dengan menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun. Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 21 Februari 2017
Yang Membuat Pernyataan

Nuralam.T

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi,SE,M.Si,Ak.CA
NBM : 1073428

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nuralam.T**
NIM : 10573 02528 11
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 21 Februari 2018
Yang Membuat Pernyataan

Nuralam.T

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi,SE,M.Si.Ak.CA
NBM : 1073428

MOTTO

Ketekunan, kesabaran, dan keiflasan

Yang senantiasa diiringi dengan doa

Adalah kunci keberhasilan yang diridhoi Allah SWT

Mempercayai diri sendiri adalah rahasia pertama untuk berhasil

Jadi percayalah kepada diri sendiri

Dan yakinlah pada diri sendiri

ABSTRAK

Nuralam. T. 2017. *Analisis Pengawasan Keuangan Terhadap Efektivitas penggunaan Anggaran Pada Kantor Bupati Enrekang*. Skripsi. Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar 2017. Dibimbing oleh H.Andi Rustam dan Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan yang terhadap efektivitas penggunaan anggaran pada kantor Bupati Enrekang. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian pustaka dan mengakses website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pengawasan keuangan terhadap efektifitas penggunaan anggaran pada kantor bupati Enrekang dalam merealisasikan pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang tergolong efektif dilihat dari tiga tahun terakhir semakin meningkat pengawasan keuangan terhadap efektifitas penggunaan anggaran yakni pada tahun 2014 memiliki rasio efektifitas 49,06% , kemudian pada tahun 2015 memiliki rasio efektifitas sebesar 54,03% dan pada tahun 2016 memiliki rasio efektifitas 59,91%

Kata Kunci: pengawasan keuangan, penggunaan Anggaran

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, peneliti haturkan syukur ke hadirat Allah Swt, berkat petunjuk dan hidayah-Nya lah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat-sahabatnya, yang senantiasa konsisten menjalankan risalah tauhid.

Skripsi dengan judul “*Analisis Pengawasan Keuangan Terhadap Efektifitas Penggunaan Anggaran di Kantor Bupati Enrekang*” merupakan karya tulis yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknya apabila pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, terutama kepada Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., AK. CA. CPA dan Ismail Badollahi, SE., M,Si.AK, CA. sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis selama menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada; (1) Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, (2) Ismail Rasulong, SE.,MM ,. selaku Dekan Fakultas Ekonomi, serta para Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat

bagi penulis. Kepada mereka tiada kata yang patut diucapkan selain ucapan terima kasih yang tak terhingga dan doa yang tulus dari penulis semoga semua bantuan diberikan mendapat pahala dan balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa uraian yang disajikan dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritikan dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan baik. Sehingga diharapkan kedepannya laporan ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan upati Allah Swt. dan hamba hanyalah manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabikul Khaerat. Wassalam.

Makassar, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERJANJIAN	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Defenisi Pengawasan	6
B. Pengawasan Efektivitas	18
C. Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	21
D. Pengertian Anggaran.....	22
E. Pengertian Penggunaan Anggaran	31
F. Pengertian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	36

G. Pengertian Kas Dan Anggaran Kas.....	38
H. Kerangka Pikir	39
I. Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B. Metode Pengumpulan Data.....	42
C. Sumber dan Jenis Data.....	44
D. Definisi Operasional	44
E. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Kabupaten Enrekang	46
B. Pemerintahan Kabupaten Enrekang.....	47
C. Visi dan Misi Kabupaten Enrekang	49
BAB V HASIL PENELITIAN	52
A. Perda Kabupaten Enrekang Mengenai Anggaran	52
B. Anggaran Putusan Daerah kabupaten Enrekang yang Realisasi.....	53
C. Sistem Pengawasan Keuangan Putusan Kabupaten Enrekang	57
D. Efektivitas Penggunaan Anggaran Kabupaten Enrekang	59
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah (Otonomi Daerah) yang dimulai Januari 2000 menimbulkan reaksi berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut baik otonomi dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang kurang sumber daya alamnya menanggapi dengan sedikit rasa khawatir dan was-was.

Kekhawatiran beberapa daerah tersebut biasa dipahami, oleh karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah saat ini, prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan paradigma. Paradigma baru pengelolaan keuangan daerah atau APBD paling tidak mendekati atau mengikuti paradigma yang berkembang dalam pengelolaan keuangan modern yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.

Keberhasilan sumber daya alam inilah yang sering mengakibatkan paradigma pengelolaan keuangan takut atau tidak berani untuk mengambil keputusan untuk bertindak. Apabila hal tersebut terjadi, maka tujuan dari pengawasan tentu saja tidak akan pernah tercapai, karena tidak pernah

dilaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan pengawasan dalam mengelola keuangan dalam kaitannya dengan APBD.

Dalam era otonomi daerah seperti saat ini, pengelolaan keuangan daerah atau penetapan APBD kini sepenuhnya merupakan hak dan wewenang pemerintah daerah, walaupun ada sumber pendapatan daerah dalam APBD yang berasal dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus). Oleh sebab itu pengelolaan dana perimbangan juga menjadi wewenang pemerintah daerah dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemanfaatan sumber daya alam kaitannya dengan APBD perlu mendapat pengawasan setiap departemen, sehingga kebocoran pelaksanaan dana dapat terhindar sebelum dana tersebut untuk dilaksanakan oleh setiap unit pada daerah masing-masing.

Pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah perlu diatur di dalam peraturan daerah yang dibuat pemerintah daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat harus sesuai pula dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibuat prosedur terhadap pengelolaan oleh masing-masing departemen.

Selanjutnya, dalam meningkatkan organisasi perlu di lakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang merupakan sarana dari segala pelaksanaan kegiatan, sehingga bisa tercipta suasana kerja dengan memanfaatkan sumber daya alam sesuai keahlian masing-masing.

Untuk itu, pengawasan keuangan secara efektif dan efisien memang penting utamanya dalam Daerah Kabupaten Enrekang (pengendalian system), karena yang dapat dijadikan sebagai alat kontrol adalah sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien, sehingga pengelolaan keuangan daerah dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini perlu adanya sistem untuk menentukan kebijaksanaan pada waktu tertentu. Dalam kebijaksanaan yang dilakukan Pemda Bupati Enrekang perlu adanya kontrol setiap saat, agar pengelolaan keuangan daerah tidak menyimpang dari ketentuan yang semestinya.

Kabupaten Enrekang melakukan pelaksanaan sistem pengawasan dengan baik terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan yang efektif dengan menggunakan sistem pengawasan yang hanya dapat tercipta bila memenuhi 2 (dua) prinsip, yaitu :

1. Merupakan suatu keharusan, bahwa rencana merupakan alat dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut merupakan petunjuk apakah suatu pekerjaan telah selesai dan berhasil.
2. Merupakan suatu keharusan bagi suatu perusahaan agar sistem pengawasan benar-benar efektif pelaksanaannya. Wewenang dan instruksi yang jelas harus diberikan kepada karyawan karena dengan berdasarkan hal tersebut. Dapat diawasi pekerjaan seorang karyawan.

Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. Tingkat pencapaian ini menunjukkan tingkat efektivitas.

Efektivitas merupakan salah satu ukuran dalam menentukan keberhasilan suatu program/rencana. Tujuan menjadi indikator dalam menentukan efektivitas, oleh karenanya tujuan dari suatu program harus jelas agar pada akhirnya dapat diketahui apakah rencana dari suatu program tersebut telah dilaksanakan.

Anggaran merupakan suatu rencana yang telah disusun secara sistematis, dimana meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu, perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang.

Bertitik dari uraian di atas, maka salah satu kasus yang ingin penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini pada obyek penelitian dengan judul **"Analisis Pengawasan Keuangan Terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran Pada kantor Bupati Enrekang"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: *"Apakah pengawasan keuangan daerah telah terlaksana secara efektif terhadap penggunaan Anggaran pada Kantor Bupati Enrekang ?"*.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan yang terhadap efektivitas penggunaan anggaran pada kantor Bupati Enrekang

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam hal pengawasan pengelolaan anggaran daerah.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi instansi, diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada Pemda Enrekang terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Bagi penulis, sebagai bahan perbandingan dalam menata pola pikir mengenai masalah pengawasan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemda Enrekang dengan teori yang telah didapatkan dibangku kuliah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Fungsi seorang pimpinan adalah menjalankan fungsinya sebagai merencanakan, mengontrol, pengorganisasi, aktuating fungsi ini merupakan fungsi setiap manager yang terakhir setelah fungsi-fungsi menyusun tenaga kerja, untuk memberi perintah. Dari kelima fungsi ini sebagai fungsi pimpinan yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan untuk jalannya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

Untuk melakukan tugas hanya mungkin dengan baik apa bila seseorang melaksanakan tugas itu mengerti arti tujuan dari tugas yang dilaksanakan. Demikian halnya dengan seorang pimpinan yang melakukan tugas pengawasan, haruslah dengan secara sungguh-sungguh mengerti arti dan tujuan dari pada apa yang akan dilaksanakan dalam pengawasan itu. Oleh karena itulah dalam pembahasan ini perlu dijelaskan pengertian pengawasan agar dapat memberikan arah pada pembahasan untuk selanjutnya. Mengerti arti dari pada pengawasan dengan baik, akan mengefektifkan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Di bawah ini penulis akan mengemukakan beberapa pendapat dari pada ahli tentang pengertian pengawasan atau dengan kata lain istilah kontrol. Untuk lebih jelasnya pengertian pengawasan dijelaskan Panglaykim dan Hazil,

Manajemen Sumber Daya Manusia, (2010: 123) menyatakan bahwa Control tidak berarti mengontrol saja, ia meliputi juga aspek penelitian; apakah yang dicapai itu sesuai dan sejalan dengan tujuan yang telah diteditetapkan lengkap dengan rencana, kebijaksanaannya program dan lain-lain sebagainya dari pada management.

Sedangkan menurut M. Manullang, Manajemen Personalia, (2008: 87), memberikan batasan pengertian sebagai berikut, internal control sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang mudah dilaksanakan menilai dan mengoreksi kita bila perlu membuat supaya pelaksanaan pekerjaan sesuatu sesuai dengan rencana semula.

Selanjutnya Martoyo Susilo, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja (2007 : 134) yang dijelaskan mengenai pengertian pengawasan (terjemahan), menyatakan bahwa controlling dapat didefinisikan sebagai proses yang memetingkan apa yang dilakukan, yaitu standar apakah yang sedang dilakukan, yaitu pekerjaan; menilai pekerjaan itu dan jika perlu menggunakan ukuran-ukuran perbaikan oleh sebab itu pekerjaan yang berlangsung sesuai dengan rencana, yaitu sesuai dengan standar.

Controlling bersifat kelanjutan bagi keempat fungsi dasar dari pada management. Bantuannya untuk memberikan jaminan bahwa apa yang ingin dilakukan adalah dijalankan dan untuk itu berbagai usaha dipertahankan di dalam memperbaiki hubungan mereka sebab itu koordinasi yang cukup dicapai. Dapatlah dikatakan bahwa tidak ada controlling tanpa adanya rencana terlebih dahulu, *organizing* dan *actuating*.

Titik berat dari pada kebutuhan menurut kenyataannya bahwa kontrol/pengawasan mempunyai hubungan erat dengan fungsi-fungsi dasar yang lain dari pada management. Rencana yang baik meliputi pertimbangan untuk menjalankan fungsi-fungsi mengenai control. Begitu juga, untuk organizing dan actuating diusahakan pengangkatan yang baik, dengan mengingat pertimbangan kontrol. Dengan jalan fungsi-fungsi actuating yang dibuat kurang sulit dan lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya.

Control pengawasan termasuk kebijaksanaan yang aktif dari pada suatu usaha untuk menjaga dari dalam bantuannya bagian dari tugas ini untuk menyelidiki apakah yang akan dilakukan dan merumuskan satu keputusan mengenai pekerjaan. Tetapi campur tangan, bilamana perlu menempatkan kembali aktivitas itu pada tempatnya juga termasuk arti dari pada control/pengawasan.

Seiring tindakan perbaikan terdiri dari pada membuka jalan seperti menghilangkan hambatan-hambatan yang akan dialami, menjelaskan kewajiban-kewajiban atau memberikan tambahan-tambahan alat-alat fisik atau keuangan agar supaya usaha-usaha yang dijalankan itu dapat dilanjutkan dengan efektif.

Control/pengawasan bukanlah berarti bahwa mengawasi semata-mata, tapii juga mengarahkan, membimbing dan mendidik para bawahan yang dipimpinnya agar supaya wewenang yang dilimpahkan padanya tidak disalagunakan wewenang dan tanggung jawan yang diberikan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas penmgertian control, dalam pembahasan ini akan dikemukakan pengertian internal control. Menurut Sri Kadarisman, Manajemen Personalialia, (2007: 112), menyatakan bahwa internal

control atau pengawasan intern ialah tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk mengetahui apakah jalannya pekerjaan dan hasilnya sesuai dengan planning atau tidak, jadi fungsi-fungsi *planning to detect a mistake immediate as it accours*".

Apa yang dikontrol ialah rencana-rencana pekerjaan atau pelaksanaan planning. Dalam hal ini kontrol bukan itu sesuatu yang telah dikerjakan saja, tetapi sesuatu yang mungkin terjadi di mana yang akan datang. Dengan demikian, planning kita kembali keputusan-keputusan yang kita ingini, membuat gambaran yang pasti dengan kontrol kita ingin mengetahui sudah sampai dimanakah rencana itu dilaksanakan. Bagaimana *foloow up* sesuatu keputusan yang telah diambil, kemudian ada kemajuan atau tidak, bila ada kemacetan sampai dimana kemacetan itu dan apa sebabnya, menurut M. Manullang, Manajemen Personalia, (2008: 92), menyatakan bahwa pengawasan intern berarti kemampuan untuk meneruskan dan memberikan motivasi serta untuk mengetahui apa yang sesungguhnya telah dilakukan dibandingkan, dengan apa yang seharusnya dilakukan. Dengan pengawasan pembuatan standard-standard mengandung untuk pengawasan pengukuran pekerjaan kantor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka proses kontrol terdiri dari pada langkah-langkah tertentu yang menjadi dasar bagi semua controlling. Tanpa memperdulikan aktivitas dari pafa beberapa dasar penerapan dalam proses mengenai kontrol intern yang ada di dalam perusahaan itu sendiri.

Dengan demikian, menurut Soekarno, K, Pengantar Manajemen (2009 : 105), menyatakan bahwa :

1. Menentukan standard atau dasar bagi control

2. Pengukuran bagi pekerjaan
3. Membandingkan pekerjaan dengan standard, dan menentukan perbedaan jika ada
4. Memperbaiki penyimpangan dengan bantuan tindakan yang bersifat "membetulkan".

Pada pengertian tersebut di atas, di nyatakan dalam kebiasaan yang sedikit berbeda, controlling, terdiri dari pada bagian, yaitu :

1. Menentukan apa yang harus dikerjakan atau dapat diharapkan sesungguhnya. Untuk menentukan hasil dengan harapan - harapan yang mana membawa kepada tercapainya tujuan.
2. Menyelidiki apa yang akan dikerjakan.
3. Menguji hasil sudah sesuai atau belum, mana kemudian menerapkan dalam ukuran-ukuran perbaikan yang akan perlu ditambah. Penggunaan dari pada proses control untuk suatu ilustrasi mengenai aktivitas-aktivitas dari bagian pembelanjaan, berita yang disampaikan untuk menjual kepada toko-toko khusus eceran. Pesanan yang sebenarnya memberikan kepastian untuk ini dengan kelak menjual yang menjalankan sebagai aktivitas pekerjaan.

Pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya, pengawasan harus berpedoman terhadap: rencana yang telah diputuskan, perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan tujuan dan kebijaksanaan

yang telah ditentukan sebelumnya (Handayani, 2009:143).

Menurut Harold Koontz memberikan pengertian pengawasan sebagai berikut : Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan tentang pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan – tujuan perusahaan dapat terselenggara. Selanjutnya H. Bohari (2007:4) menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.

Dari uraian pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan seluruh kegiatan yang sedang berlangsung untuk menjamin kegiatan tersebut sesuai dengan rencana agar tujuan semula yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

2. Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis Pengawasan Menurut Subjeknya

Dilihat dari subjeknya, DiHarna dalam bukunya Pemeriksaan dalam Pengawasan , membedakan pengawasan menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen
2. Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional
3. Pengawasan Legislatif
4. Pengawasan Masyarakat
5. Pengawasan Lembaga Swadaya Masyarakat (DiHarna, 2009:11)

Pengawasan Melekat atau Sistem Pengendalian Manajemen merupakan pengawasan yang berjalan secara otomatis yang terbentuk oleh sistem kerja dan apabila mendapatkan kesalahan, pelaksana/pimpinan satuan kerja langsung melakukan koreksi; bahkan berusaha mencegah terjadinya kesalahan. Pengawasan ini terjadi dengan adanya saling pengendalian atau saling melakukan pengawasan antar bagian dalam proses pelaksanaan karena diciptakannya “tanding procedure” dalam mekanisme kerja.

Pengawasan Aparat Pemeriksa Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa dalam institusi pengawasan yang hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan atau perbaikan perencanaan. Aparat pemeriksa fungsional mempunyai norma pemeriksaan sendiri. Pengawasan Legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat biasanya dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana, kebijaksanaan, peraturan, dan menyoroti pula cara pelaksanaan.

Pengawasan Masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat masyarakat, biasanya menyoroti kerugian atau terganggunya kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, atau masyarakatnya. Sedangkan pengawasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan indikator tumbuhnya masyarakat madani, yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang makin kuat dalam ikut mengatur kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi lembaga yang mendominasi pengaturan kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya terdapat beberapa macam pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli, ditinjau dari beberapa segi. Menurut Sujamto, dari subyeknya

pengawasan terbagi atas pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal (Sujamto) adalah: “Pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern dan ekstern”. Contohnya ialah pengawasan oleh BPK atau Inspektorat Jenderal terhadap instansi-instansi atau pejabat-pejabat atau proyek-proyek pemerintah. Sementara pengawasan informal menurut Sujamto, ialah: “Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Baik langsung maupun tidak langsung”.

Jenis Pengawasan Menurut Objeknya

Pada dasarnya terdapat beberapa macam pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli, ditinjau dari beberapa segi. Menurut Sujamto, dari subyeknya pengawasan terbagi atas pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal (Sujamto) adalah: “Pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern dan ekstern”. Contohnya ialah pengawasan oleh BPK atau Inspektorat Jenderal terhadap instansi-instansi atau pejabat-pejabat atau proyek-proyek pemerintah. Sementara pengawasan informal menurut Sujamto, ialah: “Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Baik langsung maupun tidak langsung”.

Jenis Pengawasan Menurut Sifat Dan Waktu

Jenis pengawasan menurut sifat atau waktu menurut Handayaniingrat dapat dibedakan menjadi: pengawasan preventif dan pengawasan refresif.” (Handayaniingrat, 2007:145-146) Pengawasan preventif diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan, atau disebut pula

sebagai pre-audit dalam sistem pemeriksaan anggaran.” (Handayaniingrat, 2007:145)

Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.
2. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
3. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya.
4. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai, dan pembagian pekerjaannya.
5. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
6. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturanyang telah ditetapkan. (Handayaniingrat, 2007:145)

Sedangkan pengawasan represif diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.” (Handayaniingrat, 2007:145) Maksudnya adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini dapat menggunakan 4 sistem pengawasan, yaitu: “Komperatif, Verifikatif, Insektif, atau Investigatif.” (Handayaniingrat, 2007:145-146)

Jenis Pengawasan Menurut Ruang Lingkupnya

Jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: “Pengawasan dari dalam (internal control) dan pengawasan dari luar (eksternal control).” (Handyaningrat, 2007:144) Pengawasan dari dalam (internal control) berarti: “Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit Pengawasan yang terbentuk di dalam organisasi itu sendiri.” (Handyaningrat, 2007:144) Aparat/Unit Pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan Organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Sedangkan pengawasan dari luar (eksternal control) diartikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi.” (Handyaningrat, 2007:144) Aparat/unit pengawasan merupakan aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu atau bertindak atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya.

3. Keuangan

Keuangan dalam KBBI (2008:1767) diartikan : (1) segala sesuatu yang bertalian dengan uang; (2) seluk beluk uang; (3) urusan uang; (4) keadaan uang.

Contoh dalam kalimat: biaya rumah sakit tidak terjangkau oleh keuanganku. (artinya: kondisi uang/harta/kekayaanku tidak bisa menjangkau biaya rumah sakit),

Dalam bahasa Indonesia, Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Istilah keuangan dapat berarti: (1) Ilmu keuangan dan asset lainnya; (2) Manajemen asset tersebut; (3) Menghitung dan mengatur risiko proyek.

Ridwan dan Inge (2008). Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan pemerintah.

4. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan Keuangan Daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku (Baswir, 2008). Sedangkan berdasarkan objeknya, pengawasan keuangan daerah meliputi baik pengawasan keuangan APBD, pengawasan BUMD, maupun pengawasan barang-barang milik daerah lainnya.

Bila ditelusuri lebih jauh, maka mekanisme pengawasan keuangan daerah

dapat dibedakan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal, pengawasan internal adalah mekanisme pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah secara internal dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh suatu lembaga pengawasan yang sama sekali berada di luar birokrasi pemerintahan. Dalam garis besarnya, penyelenggaraan pengawasan internal ini dapat dipilah menjadi pengawasan internal melalui system pengawasan dan pengawasan internal melalui lembaga-lembaga pengawasan.

Dalam pengawasan keuangan daerah terdapat kriteria tingkat efektivitas antara lain :

- a. Hasil perbandingan atau presentasi pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- b. Hasil perbandingan atau presentasi pencapaian diatas 90% sampai 100% berarti efektif
- c. Hasil perbandingan atau presentasi pencapaian diatas 80% sampai 90% berarti cukup efektif
- d. Hasil perbandingan atau presentasi pencapaian diatas 60% sampai 80% berarti kurang efektif
- e. Hasil perbandingan atau presentasi pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif

5. Sasaran Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Enrekang tahun 2009, sasaran program kegiatan Inspektorat Kabupaten Enrekang adalah ;

- a. Tercapainya pemeriksaan terhadap seluruh instansi di lingkungan Pemda kabupaten Enrekang.
- b. Tercapainya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan mengenai temuan-temuan hasil pemeriksaan.
- c. Tercapainya Pelayanan Surat Pengaduan dari Masyarakat
- d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang
- e. Terlaksananya kegiatan Review terhadap laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.
- f. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Enrekang
- g. Menurunnya Tingkat Penyelewengan Anggaran
- h. Tercapainya Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas yang Profesional.

B. Pengertian Efektivitas

Efektivitas dalam pengertian secara umum adalah kemampuan berdaya guna dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan sehingga memberikan hasil guna (efisien) yang maksimal. Dalam memaknai efektivitas setiap orang memberi arti yang berbeda, sesuai sudut pandang dan kepentingan masing-masing.

Kajian yang menyeluruh mengenai efektivitas dalam suatu aktivitas secara umum mengarah kepada proses pelaksanaan ataupun tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Kegiatan yang dimaksud adalah

kegiatan yang memberikan manfaat dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Mengenai defenisi efektivitas ini sendiri, banyak ahli yang mengemukakan pandangannya dengan sudut yang berbeda.

Efektivitas merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara cermat dan tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemampuan dari setiap perangkat kerja baik perangkat kerja manusia maupun bukan manusia yang dapat melahirkan suatu hasil yang maksimal yang digunakan sesuai tujuan yang diharapkan. Jelaslah bahwa efektivitas tidak lain adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk mengelola dan mendesain suatu organisasi untuk meningkatkan bawahannya ataupun peserta didiknya agar menjadi manusia yang lebih kreatif dan mampu menjalankan semua tugas yang diembankan padany dengan baik dan benar.

Menurut (Mulyasa, 2009:82) dikemukakan bahwa Efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya). Jadi efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Sementara itu Rahmat (2011:92) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dari beberapa pendapat para ahli diatas, suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich konsep efektivitas terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan Tujuan dan pendekatan sistem (2007:27-29).

Dua pendekatan tersebut antara lain :

Pendekatan tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Arus masukan (input) dan keluaran (output) merupakan titik tolak dalam uraian organisasi. Dengan kata lain yang lebih sederhana, organisasi mengambil sumber (input) dari sistem yang lebih luas (lingkungan), memproses sumber ini dan mengembalikannya dalam bentuk yang sudah dirubah (output).

Gibson, Donnely dan Ivancevich memberikan batasan dalam kriteria efektivitas organisasi melalui pendekatan teori sistem (2007:31-32) antara lain :

1) Produksi

Produksi merupakan Kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan.

2) Efisiensi

Konsep efisiensi didefenisikan sebagai angka perbandingan (rasio) antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau dengan output.

3) Kepuasan

Kepuasan menunjukkan sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan para karyawan pengguna.

4) Adaptasi

Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan ekstern dan intern.

5) Perkembangan

Organisasi harus menginvestasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya untuk hidup terus dalam jangka panjang.

6) Hidup Terus

Organisasi harus dapat hidup terus dalam jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar di atas, peneliti menggunakan teori Emerson dalam Handyaningrat (2009:16) bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif

C. Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Suatu system dikatakan efektif jika output yang dihasilkan oleh suatu orang (kelompok) sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam Robert & Vijay (2008:174) dikatakan bahwa “efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pisat tanggung jawab dengan tujuannya”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dikatakan efektif jika tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut yaitu guna dalam peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah.

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas diperlukan suatu system pengendalian intern yang baik. Dalam lingkungan pemerintahan Sistem pengendalian Intern disebut SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008, pasal 1 no.2).

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008, pasal 1 no.1).

D. Pengertian Anggaran

Anggaran dalam berbagai pengertian banyak diartikan sebagai pernyataan kuantitatif. Hal ini terlihat antara lain pada pengertian anggaran yang dikemukakan oleh Charles T. Hongren dan George Foster dalam bukunya *Cost Accounting*, (2007: 146), sebagai berikut anggaran adalah suatu pernyataan kuantitatif tentang apa rencana atau tindakan dan alat bantu untuk koordinasi dan implementasi. Selain itu, diartikan juga bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang telah disusun secara sistematis, dimana meliputi seluruh kegiatan perusahaan

yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu, perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang.

Definisi anggaran menurut Peraturan Pemerintahan No. 24 tahun 2008 adalah bahwa pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang di ukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anthony (2007:74) mendefinisikan “Anggaran sebagai suatu rencana manajemen, dengan asumsi implisit bahwa langkah-langkah diambil oleh pembuat anggaran, manajer yang menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana”.

Definisi anggaran dikemukakan oleh Homgren, et.al (2009:250) sebagai berikut : “A budget is tool that help managers in both their planning and control functions”. Definisi ini memberikan suatu pemahaman bahwa anggaran merupakan alat yang dapat membantu manajer dalam menjalankan kedua fungsi yaitu perencanaan dan pengendalian.

Menurut Harahap (2009:15) pengertian Anggaran atau Budget adalah sebagai berikut : “Budget adalah konsep yang membantu manajemen dan mempermudah manajemen dalam mencapai tujuannya”. Sedangkan menurut Simamora (2010:202) “Anggaran merupakan rencana finansial yang dipakai untuk pengelolaan sumber daya organisasi”.

National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental Accounting Standards Board (GASB), mengemukakan definisi anggaran (budget) sebagai berikut: “anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”. (Anggaran Sektor Publik, Wikipedia)

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan anggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2002).

Penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan social ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran juga merupakan sarana untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik.

Adapun jenis-jenis anggaran beserta pengertiannya secara singkat :

1. Anggaran penjualan

Anggaran ini memuat mengenai rencana penjualan selama periode/waktu anggaran, yang dinyatakan dalam satuan uang dan juga kuantitas penjualan.

Anggaran ini disusun berdasarkan proyeksi penjualan yang dibuat oleh perusahaan. Anggaran penjualan sering disebut juga sebagai kunci dalam proses penyusunan anggaran, sebab anggaran tersebut merupakan dasar dari penyusunan jenis-jenis anggaran yang lain, diantaranya yaitu: anggaran produksi, anggaran kas, anggaran biaya nonproduksi, anggaran rugi-laba.

Definisi dari anggaran penjualan adalah suatu anggaran yang menerangkan secara terperinci dan juga teliti tentang penjualan perusahaan dimasa datang, dimana didalamnya terdapat rencana tentang jenis-jenis barang, jumlah, harga, waktu maupun tempat penjualan barang tersebut.

2. Anggaran Produksi

Anggaran ini memuat mengenai rencana unit-unit yang diproduksi selama periode anggaran. Taksiran produksi ini ditentukan berdasarkan rencana penjualan maupun persediaan yang diharapkan. Anggaran produksi merupakan dasar dari penyusunan anggaran biaya produksi, diantaranya yaitu anggaran : biaya overhead pabrik, biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Anggaran produksi dapat juga dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran persediaan ataupun sebaliknya.

3. Anggaran Biaya Bahan Baku

Anggaran ini mengenai taksiran bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi, yang dinyatakan dalam satuan uang dan kuantitas bahan baku. Lalu dari anggaran ini akan diketahui pembelian bahan baku yang dianggarkan, yang selanjutnya dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran kas dan rugi-laba.

4. Anggaran Pertanggung Jawaban

Adalah anggaran operasi yang disusun berdasarkan pasar pertanggung jawaban yang terdapat di dalam perusahaan. Program pertanggung jawaban ini digunakan sebagai alat pengendalian setiap manajer dan juga sebagai pusat pertanggung jawaban yang dipimpinnya.

5. Anggaran Kas

Anggaran ini memuat taksiran sumber dan juga penggunaan kas selama periode (waktu) anggaran. Anggaran ini disusun dari anggaran operasi dan pengeluaran modal, dan juga dipakai sebagai dasar penyusunan anggaran kas bagi suatu perusahaan sangatlah penting sekali, artinya bagi penjagaan liquiditas perusahaan itu.

Dalam hal ini anggaran dirumuskan untuk organisasi secara keseluruhan ataupun sub unit, di mana anggaran merupakan suatu prosedur yang disebut budgending system.

Perencanaan dengan anggaran dengan mengidentifikasi pada manajemen mengenai :

1. Jumlah laba yang ditetapkan untuk dicapai perusahaan
2. Sumber dana yang diperlukan dalam mencatatkan laba

Pengendalian biaya, yaitu membandingkan antara hasil aktual dengan anggaran yang akan membantu manajemen untuk mengevaluasi kinerja dari individu, departemen divisi atau keseluruhan organisasi perusahaan.

Komunikasi dan koordinasi, yaitu anggaran mampu untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan keseluruh level dalam departemen,

karena anggaran merupakan bagian integral dari tujuan-tujuan tersebut departemen divisi dan organisasi perusahaan.

Selanjutnya, definisi anggaran yang mengandung pengertian yang sama dilakukan oleh Ray H. Garisson (2008: 297), menyatakan bahwa *a budget is a detail plan outlining acquisition and use of financial and other resources some gives time period.*

Selain mencakup ramalan atau perencanaan mengenai pendapatan dan pengeluaran penerimaan dan biaya untuk mempermudah proses perencanaan ini sendiri, maka semua kegiatan operasi dari perusahaan yang menyusun anggaran harus dikonversikan kedalam bentuk kesatuan nilai uang. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat di ukur dalam alat kesatuan yang sama.

Pengertian anggaran yang mengandung pengertian sebagaimana disebutkan di atas, ditemukan oleh, Teguh Pajo Mulyono (2009 : 287) yang menyatakan bahwa *budget is a plan of operation expessed in monetary terms it consequently includes a forecast a forecast of income and expenditures and of receipts and cost for a specific period.*

Setiap organisasi perusahaan utamanya perusahaaa dengan organisasi yang besar, tidak akan terlepas dari kegiatan pengendalian. Pengendalian (*control*) dapat memberikan keputusan bahwa sumber-sumber yang diperoleh telah digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk maksud tersebut di atas, budgeting adalah salah satu tehnik yang tersedia.

Budgeting merupakan rencana kegiatan yang terperinci ditetapkan sebagai suatu pedoman pelaksanaan dan sebagai suatu dasar penilaian terhadap prestasi kerja manajer.

Jika kita melihat pengertian budget yang dikemukakan, maka dimensi waktu juga turut dimasukkan sebagai batasan anggaran, karena dapat menyebabkan semua biaya total menjadi variabel atau semua biaya tidak dapat dibedakan antara biaya yang dapat dikendalikan (*controllable cost*) dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable cost*).

Pada perusahaan yang sudah sedemikian stabil, biasa saja membuat peramalan untuk beberapa tahun, atau dengan kata lain dalam jangka panjang. Namun bagi perusahaan yang banyak menghadapi ketidak pastian, hanya mungkin untuk membuat peramalan jangka waktu yang pendek saja, jadi jangka waktu yang dicukupi oleh anggaran juga, tergantung dari sifat suatu perusahaan itu sendiri, namun anggaran yang disusun menurut kurun waktu bulanan adalah yang paling baik karena rencana kegiatan nampak. Disamping itu anggaran bulanan sangat menunjang pelaksanaan pengendalian yang terjadi dengan segera dapat diketahui.

Proses penganggaran mempunyai beberapa tujuan :

1. Anggaran menyajikan perencanaan keuangan yang memungkinkan perusahaan untuk dapat mengkoordinasikan semua aktivitasnya. Dengan menggunakan anggaran para manajer dapat memproyeksikan hasil dan mengatur strategi yang dibutuhkan sebelum operasi perusahaan dapat dimulai, sehingga dapat menghindari kesalahan yang merugikan perusahaan.

2. Proses penganggaran mendorong para manajer untuk menguji kembali prestasi yang pernah diraih dan memungkinkan mereka mengubah kembali dan mengoreksi metode operasi yang kurang efisiensi ketinggalan jaman.
3. Anggaran memungkinkan para manajer untuk mengimplementasikan fungsi perencanaan dan pengawasan.

Berdasarkan pengertian di atas, Calvin Engler (2007 : 305), mengemukakan bahwa, *A budget is a financial plan that sets forth resources necessary to carry out activities and meet financial goals for a future period time.*

Agar supaya anggaran dapat berfungsi sebagai alat koordinasi dan kontrak, maka masing-masing manajer harus satu tahun jelas luas kekuasaan dan tanggungjawabnya. Ini supaya tidak terjadi overlapping yang mungkin menyebabkan keruwetan dan kekaburan mengenai tugas masing-masing yang telah dibebankan. Demikian pula dengan anggaran dapat berfungsi sebagai alat motivasi kalau setiap manajer dan kepala bagian diikutsertakan dalam penyusunan perencanaan anggaran ini berarti perlu adanya pendelegasian wewenang kepada masing-masing manajer, untuk itu menyusun anggaran operasinya. Dengan demikian masing-masing manajer akan merasa bertanggung jawab sehingga timbul partisipasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan kesemuanya itu menunjukkan sifat yang sama, yaitu bahwa anggaran itu merupakan suatu rencana kegiatan yang tertulis mengenai apa yang dilakukan oleh suatu organisasi yang meliputi peramalan, pendapatan, pengeluaran, penerimaan dan biaya-biaya selama periode tertentu yang dikonversi dalam kesatuan nilai atau moneter.

Menurut D. Hartanto dalam bukunya Akuntansi Untuk Usahawan (2009 : 131) ada 4 (empat) macam anggaran sebagai berikut :

1. Appropriation budget
2. Performance budget
3. Fixed budget
4. Flexible budget.
 - a. Appropriation budget adalah untuk memberikan batas pengeluaran yang boleh dilakukan. Batas tersebut merupakan jumlah maximum yang dapat dikeluarkan untuk satu hal tertentu. Dalam macam anggaran ini umumnya digunakan dalam pemerintahan. Namun bagi perusahaan untuk hal-hal tertentu sangat terbatas keinginan seperti, hanya untuk penelitian dan advertising saja.
 - b. Performance budget adalah anggaran yang didasarkan pada atas fungsi aktivitas dan proyek. Pada anggaran ini perhatian ditujukan pada penilaian atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk suatu hal tertentu. Dengan demikian efisiensi dan efektifitas operasi dapat diketahui. Di dalam perusahaan anggaran yang lazim digunakan adalah formance budget.
 - c. Fixed budget adalah anggaran yang dibuat untuk satu tingkat kegiatan selama jangka waktu tertentu, dimana tingkat kegiatan ini dapat dinyatakan dalam prosentase dan kapasitas jumlah produk yang dihasilkan selama jangka waktu tertentu pada Foxed budget hanya digunakan jika diketahui dengan pasti bahwa volume real yang akan dicapai tidak jauh berbeda dengan volume yang direncanakan semula.

d. Flexible budget adalah bahwa untuk setiap tingkat kegiatan terdapat norma-norma atau ketentuan antar biaya yang diperlukan. Norma itu merupakan patokan dari pengeluaran yang seluruhnya dilakukan pada masing-masing tingkat kegiatan tersebut.

Dalam penyusunan anggaran suatu perusahaan perlu diperlukan beberapa syarat seperti yang dilakukan oleh Gunawan Adisaputra dan Marwan Asri dalam bukunya Anggaran Perusahaan (2009 : 7) menyatakan bahwa di dalam penyusunan anggaran perusahaan, maka perlu diperlukan beberapa syarat bahwa anggaran harus realitis, luwes dan kontinyu.

E. Pengertian Penggunaan Anggaran

Penggunaan yang penulis maksudkan disini menyangkut masalah perencanaan anggaran belanja rutin sebagaimana yang disampiakan oleh Haw Widjaya, dalam bukunya Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi (2009 : 15) apa yang digariskan dalam dalam penetapan penggunaan anggaran rutin, sebagai berikut :

1. Suatu rencana yang sudah disyahkan
2. Rencana bagian dari pada rencana keseluruhan yang berupa anggaran.
3. Kalkulasi dari pembiayaan kegiatan pemerintah.

Dengan fungsinya yang demikian itu, maka rencana anggaran adalah perkiraan untuk waktu yang akan datang disusun berdasarkan perjalanan-perjalanan masa lalu dan masa kini. Penyusunannya yang sistimatis haruslah dilakukan atas dasar klasifikasi anggaran yang digunakan.

Untuk lebih jelasnya klasifikasi anggaran yang dimuat maka terlebih dahulu dijelaskan dalam berbagai macam klasifikasi anggaran, dalam anggaran sebagai klasifikasinya meliputi :

1. Klasifikasi obyek
2. Klasifikasi organik
3. Klasifikasi fungsional
4. Klasifikasi ekonomi
5. Klasifikasi program performance.

Dari pengertian klasifikasi obyek pengelompokan pengeluaran-pengeluaran ke dalam jenis barang jasa yang apakah dibeli. Sedangkan untuk klasifikasi organik adalah pengelompokan anggaran atas kategori suatu organisasi.

Klasifikasi Fungsional adalah merupakan salah satu pengelompokan pengeluaran atas dasar fungsi-fungsi yang akan dijelaskan oleh Mardiasmo, dalam bukunya Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, (2010 : 1240 menyatakan bahwa ekonomi adalah pengelompokan pengeluaran atas dasar kelompok kegiatan fungsi dan proyek yang akan dicapai sehingga dari pengeluaran-pengeluaran anggaran nantinya dapat diukur efisiensi dan penegasan yang dapat dijalankan. Dengan mengetahui macam-macam klasifikasi anggaran tersebut di atas, dengan data yang ada dapatlah ditentukan perencanaan anggaran belanja rutin pada lokasi penelitian yang terpilih disusun berdasarkan dengan sistimasi sebagai dasar dalam pertimbangan klasifikasi anggaran yang sesuai.

Untuk itu penulis akan menyajikan data-data dalam penyusunan anggaran belanja rutin pada lokasi yang terpilih dimana anggaran tersusun sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai terbagi atas :
 - a. Gaji Pokok
 - b. Tunjangan Tambahan
 - c. Tunjangan istri / suami
 - d. Tunjangan anak
 - e. Tunjangan jabatan
 - f. Belanja Pegawai lainnya yang meliputi :
 - 1) Tunjangan pangan/beras
 - 2) Biaya lembur
 - 3) Honor untuk juru pemelihara bangunan purbakala
2. Belanja barang terdiri atas :
 - a. Keperluan sehari-hari perkantoran, dipergunakan untuk :
 - 1) Keperluan bahan/ alat tulis menulis
 - 2) Perlatan kantor ketata usahaan
 - 3) Perlatan bahan/ alat tulis menulis dan bahan lain
 - 4) Perlatan rumah tangga kantor
 - 5) Bahan rumah tangga kantor
 - 6) Pembiayaan benda-benda pos
 - 7) Biaya rapat dinas
 - 8) Biaya penerimaan tamu
 - 9) Biaya transportasi

10) Biaya petugas jaga malam.

b. Belanja barang inventaris kantor :

- 1) Semua barang-barang yang berhubungan dengan barang inventaris kantor.
- 2) Barang-barang keperluan tambahan

c. Belanja langganan daya jasa yang terbai atas :

- 1) Biaya langganan listrik
- 2) Biaya langganan telepon
- 3) Biaya langganan gas dan air

d. Bahan alat-alat dan barang-barang lain, meliputi belanja :

- 1) Peralatan pemeliharaan benda-benda dan bangunan kuno
- 2) Peralatan penggambaran
- 3) Peralatan fotografi
- 4) Peralatan pemerataan
- 5) Peralatan laboratorium
- 6) Bahan-bahan untuk fotografi
- 7) Ganti rugi tanah
- 8) Pembelian benda-benda kuno/ benda-benda bersejarah
- 9) Pembelian benda-benda seni
- 10) Peralatan survey

e. Lasin-lain belanja terdiri dari :

- 1) Biaya pengamanan/ penjagaan pemilikan benda-benda, situs-situs, bangunan-bangunan bersejarah.

- 2) Biaya ganti rugi tanah/ barang dalam rangka perlindungan sejarah dan kepurbakalan.
 - 3) Biaya pemerataan obyek-obyek sejarah dan ke purbakalaan.
3. Belanja Pemerintah terdiri dari :
- a. Belanja pemeliharaan gedung kantor
 - b. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas
 - c. Belanja pemeliharaan barang-barang inventaris kantor
 - d. Belanja pemeliharaan peralatan teknis
 - e. Lain-lain belanja pemeliharaan, yaitu :
 - 1) Pemeliharaan bangunan kuno
 - 2) Pemeliharaan benda-benda bersejarah/ kuno.

4. Belanja perjalanan dinas

Untuk perjalanan dinas disini, maka semua unit kerja harus dapat menentukan, daerah mana saja yang direncanakan dan perlu ditinjau, dibina, diarahkan kegiatan yang mana harus dilaksanakan oleh semua daerah atau suaka-suaka yang ada di daerah.

Setelah penulis mengemukakan sistematika perencanaan pembelanjaan tersebut dibagi atas :

- a. Jenis belanja pegawai
- b. Jenis belanja barang
- c. Jenis belanja perjalanan dinas

F. Pengertian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah menganut sistem pengurusan yang sama dengan sistem pengurusan keuangan negara yang pada pokoknya yaitu:

- 1) Pengurusan administrasi, yaitu wewenang untuk mengadakan tindakan-tindakan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga daerah yang membawaakibat pengeluaran-pengeluaran yang membebani anggaran daerah. Pengurusan ini terdiri dari tindakan otorisator (penandatanganan SP2D) dan tindakan ordonator (penandatanganan SPM).
- 2) Pengurusan ke pemegang kas, yaitu wewenang untuk menerima, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang, serta berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah. Pengurusan ini dilaksanakan oleh pemegang kas daerah dan pemegang kas.

Pengertian keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut: “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraa, pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan jewajiban daerah tersebut. Adapun pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.

Sedangkan pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Halim (2002:9) mengemukakan sebagai berikut: “Pengelolaan keuangan daerah merupakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Menurut Bastian (2007:70-71) mengatakan bahwa sesuatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, hendaknya disertai dengan pelaksanaannya yang tertib dan disiplin, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sumarsono (2010:121) mengemukakan bahwa pelaksanaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Mardiasmo (2008:14) mengemukakan bahwa tujuan dari pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) meliputi:

- a. Tanggung jawab.
- b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan.
- c. Kejujuran.
- d. Hasil guna.
- e. Pengendalian.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah

Daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan APBD harus dilandaskan pada aspek tanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna dan pengendalian.

G. Pengertian Kas dan Anggaran Kas

Kas adalah modal kerja yang sangat likuid. Semakin besar jumlah kas yang ada dalam suatu perusahaan berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai resiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang sangat besar, karena semakin besar kas berarti semakin besar dana yang menganggur dan akan memperkecil laba yang akan diperoleh.

Sebaliknya jika perusahaan hanya akan mengejar keuntungan saja tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain maka semua kas akan dalam keadaan bekerja. Jika hal itu terjadi artinya perusahaan akan berada di posisi illikuid apabila suatu saat ada penagihan hutang atau ada hutang yang jatuh tempo tapi perusahaan tidak mampu membayar karena tidak ada persediaan kas baik di bank ataupun di perusahaan.

Untuk menjaga likuiditas perusahaan perlu membuat perkiraan atau estimasi mengenai aliran kas di dalam suatu instansi pemerintah. Dalam hal ini instansi tersebut perlu menyusun anggaran kas.

Untuk lebih jelasnya oleh Bambang Riyanto (2006 : 19) menyatakan bahwa kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya.

Kalau Syafaruddin (2008 : 27) memberikan batas tertentu tentang penggunaan dana yaitu pengertian anggaran kas atau cash forecast (ramalan kas), adalah kebutuhan kas dalam jangka pendek yang merupakan bagian dari financial planning perusahaan.

Periode anggaran kas umumnya disusun untuk jangka waktu satu tahun yang dibagi dalam interval tertentu seperti bulanan, kuartalan dan enam bulan, untuk menyusun anggaran kas yaitu dalam mingguan atau bulanan. Sedangkan perusahaan yang mempunyai pola cash flow relatif dapat menyusun anggaran kas dalam kuartalan atau tahunan. Namun demikian jarang sekali anggaran kas disusun untuk lebih dari waktu satu tahun. Walaupun dengan interval bulanan.

Karena sukar untuk menjamin validitas ramalan baik ramalan penerimaan kas namun ramalan pengeluaran kas. Apabila jika dihadapkan dengan situasi ekonomi yang kurang stabil. Pada tingkat inflasi yang tinggi misalnya, anggaran kas lebih baik disusun dalam interval yang lebih pendek yaitu dalam bulanan.

Masukan kunci dari anggaran kas adalah ramalan penjualan atas sales forecast yang diberikan oleh bagian penjualan. berdasakaan ramalan tersebut, manajer financial dapat mengestimasi cash flow bulanan yang dihasilkan dari produksi penerimaan baik penerimaan dari penjualan tunai maupun dari penjualan kredit dan pengeluaran.

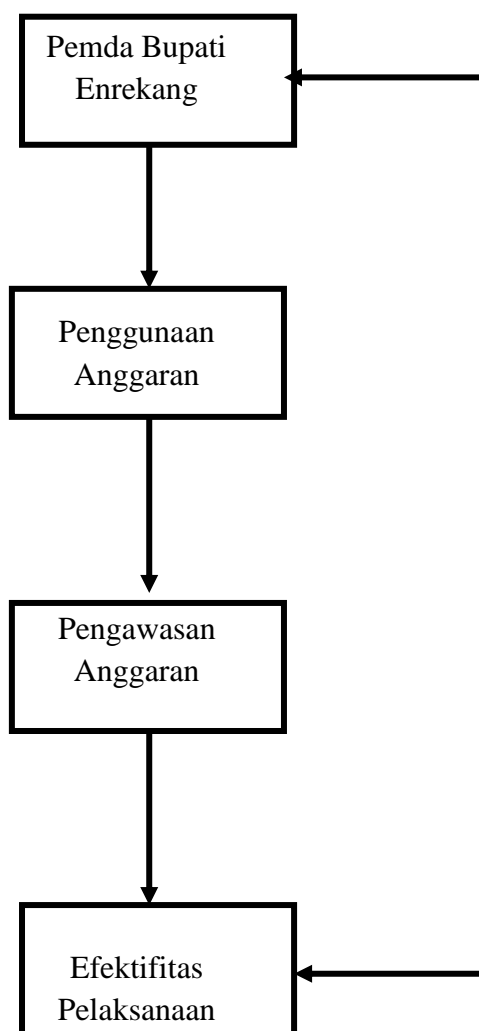
H. Kerangka Pikir

Salah satu instansi pemerintah dalam hal ini Pemda Kabupaten Enrekang turut melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan sepenuhnya menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah khususnya yang telah disyahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengelolaannya dengan menggunakan dana bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diseimbangkan antara pendapatan dan penggunaannya.

Adapun kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, dapat digambarkan dalam bentuk skema, sebagai berikut :

Bagan: Kerangka Pikir



Sumber data : Kordinator Statistic Kabupaten Enrekang

I. Hipotesis

Hipotesis pada umumnya adalah suatu jawaban sementara terhadap suatu masalah yang akan diteliti. Di mana masalah yang diteliti telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Berdasarkan tinjauan dan kerangka pikir yang dikemukakan sebelumnya. Maka penulis, merumuskan hipotesis adalah:

H_1 : Diduga bahwa pengawasan keuangan dalam penggunaan anggaran telah berjalan secara efektif pada kantor Bupati Enrekang".

H_0 : Diduga bahwa pengawasan keuangan dalam penggunaan anggaran tidak berjalan secara efektif pada kantor Bupati Enrekang".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti memilih maka Kantor Bupati Enrekang sebagai tempat penelitian.

Peneliti melakukan penelitian di kantor Bupati Enrekang untuk memperoleh data yang di perlukan maka, peneliti meneliti di kantor Bupati Enrekang selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan peneliti memulai penelitiannya di kator Bupati Enrekang di mulai atau dilaksanakan pada tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 November 2016.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya menghasilkan hasil yang sebenarnya sesuai dengan apa yang akan dilaporkan oleh penulis, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

1. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian langsung pada obyek yang diteliti dengan menggunakancara :

- a. Observasi

Metode observasi dalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematik fenomena-fenomena yang yang diselidiki. Metode observasi yang digunakan adalah metode observasi non partisi, di mana metode observasi ini tidak

mengambil bagian dalam kegiatan yang sedang dibservasi. Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi objek di kantor Bupati Enrekang, data keuangan, data kas, data pengawasan keuangan.

b. Wawancara, Interview

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat, yang disajikan dalam bentuk pertanyaan. Dalam penelitian ini digunakan wawancara, interviu bebas terpimpin dimana pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan dan bersifat longgara tanpa keluar dari pedoman yang dipakai melalui wawancara tidak berstruktur, yaitu hanya memuat garis-garis besar yang dipertanyakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada Dinas Kabupaten Enrekang, LHP 2012 mulai dari literatur dan buku-buku yang ada. Adapun dokumen-dokumen yang menggambar sejarah Dinas Kabupaten Enrekang yang menerangkan struktur organisasi pada Dinas Kabupaten Enrekang.

2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel,

situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3. Mengakses website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, penulis meneliti secara langsung pada obyek penelitian dengan jalan menyusun daftar pertanyaan, mengadakan wawancara langsung pada bagian keuangan dan akuntansi serta bagian produksi.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan baik berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya *overhead* pabrik serta informasi tertulis dari pihak lain dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kuantitatif, berupa data yang berhubungan dengan penetapan harga pokok produk perusahaan.
- b. Data kualitatif, berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, proses produksi dan informasi lainnya yang relevan dengan penulisan ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional

semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama.

Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru. Definisi operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Logikanya, boleh jadi, antara peneliti yang satu dengan yang lain bisa beda definisi operasional dalam 1 judul skripsi yang sama.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (*descriptive quantitative analysis method*), yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan Rasio Keuangan dalam mengukur efektifitas penggunaan anggaran, dengan menghitung Rasio Efektifitas dari realisasi anggaran yang tertuang dalam APBD dan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun Anggaran 2014-2016 yang dilakukan dengan cara menghitung rasio efektifitas dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Kabupaten Enrekang

Enrekang berdiri sebagai satu Kabupaten berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 (LN No. 74 Tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dimana Kabupaten Enrekang berdiri sendiri sebagai satu Kabupaten dengan ibukotanya Enrekang. Kabupaten Enrekang sebagai salah satu daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola serta memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dan masyarakat umum.

Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai suatu organisasi telah menyusun dan menetapkan kembali beberapa lembaga/instansi otonom berdasarkan peraturan daerah, yang berfungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Kabupaten Enrekang berada di jantung jasiarah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap

d. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Secara keseluruhan Kabupaten Enrekang memiliki Wilayah seluas 1.786,01 km². Jika dibandingkan luas wilayah Sulawesi Selatan, maka luas wilayah Kabupaten Enrekang sebesar 2,83 %.

Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang kecil yaitu terdiri atas 129 wilayah desa/kelurahan.

Tabel V.I

Luas daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2016

No.	Nama Kecamatan	Luas Area (km ²)	Persentase Terhadap Luas Enrekang (%)
1.	Maiwa	392,87	22,00
2.	Bungin	236,84	13,26
3.	Enrekang	291,19	16,30
4.	Cendana	91,01	5,10
5.	Baraka	159,15	8,91
6.	Buntu Batu	126,65	7,09
7.	Anggeraja	125,34	7,02
8.	Malua	40,36	2,26
9.	Alla	34,66	1,94
10.	Curio	178,51	9,99
11.	Masalle	68,35	3,83
12.	Baroko	41,08	2,30
Kabupaten Enrekang		1,786,01	100

B. Pemerintahan Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang telah beberapa kali mengalami pergantian bupati sejak awal mula terbentuknya yaitu pada tanggal 1960. Adapun Bupati yang pernah memegang tumpuk pemerintahan di Kabupaten ini adalah :

1. Periode 1960-1963 dijabat oleh Andi Baba Mangopo
2. Periode 1963-1964 dijabat oleh M. Nur
3. Periode 1964-1965 dijabat oleh M. Chatif Lasiny
4. Periode 1965-1969 dijabat oleh Bambang Soetrisna
5. Periode 1969-1971 dijabat oleh Abd. Rachman, BA
6. Periode 1971-1978 dijabat oleh Much. Daud (\pm Tahun masa non aktif, dan Pjs. Oleh Drs. A. Parawansa)
7. Periode 1978-1983 dijabat oleh H. Abdullah Dollar, BA
8. Periode 1983-1988 dijabat oleh M. Saleh Nurdin Agung
9. Periode 1988-1993 dijabat oleh H.M. Amien Syam
10. Periode 1993-1998 dijabat oleh H. Andi Rahman
11. Periode 1998-2003 dijabat oleh Drs. H. Iqbal Mustafa
12. Periode 2003-2008 dijabat oleh Ir. Haji La Tinro La Tunrung
13. Periode 2008-2013 dijabat oleh Ir. Haji La Tinro La Tunrung
14. Periode 2014 sampai sekarang dijabat oleh Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd

C. Visi dan Misi Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang mempunyai visi dan misi “Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan” Pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan berikut ini untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Enrekang, dimaknai sebagai suatu kesatuan wilayah Kabupaten Enrekang yang dihuni oleh seluruh warga masyarakat, yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Maju, Kondisi dimana terjadi peningkatan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), ketersediaan Infrastruktur yang memadai serta aplikasi teknologi.

Aman, mengandung makna keadaan yang lebih kondusif untuk berlangsungnya aktivitas pemerintahan, sosial budaya, aktivitas ekonomi dan investasi, yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha/ berinvestasi, bekerja, beribadah serta aman dari bencana. Keadaan yang menggambarkan perwujudan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju.

Sejahtera, dimaknai keadaan dimana terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya IPM, peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat, serta terpenuhi dan tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara layak.

Menuju Daerah Agropolitan, dalam pengertian bahwa periode pembangunan Lima (5) tahun kedepan (2014-2018) sebagai tahapan dari proses mewujudkan daerah Agropolitan 2028 sesuai Visi Jangka Panjang Daerah, yang ditandai dengan kondisi berkembangnya pusat-pusat ekonomi berbasis pertanian yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kawasan pengembangan komoditi unggulan pertanian, yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya berbagai

aktivitas ekonomi pendukung utama sistem agribisnis pertanian di Sulawesi Selatan.

Berwawasan Lingkungan, diartikan sebagai komitmen memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu/kualitas hidup masyarakat masa kini dan masa mendatang.

Misi pembangunan daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Publik, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum (Jalan, Jembatan, Sanitasi, Air Bersih, Irigasi/Sumber Air Pertanian, Listrik dan Telekomunikasi) yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas publik;
2. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi, yaitu peningkatan SDM masyarakat melalui penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, berkualitas didukung oleh penguasaan Iptek dalam meningkatkan produktivitas dan kompetensi masyarakat;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-Laki Perempuan, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin

dari berkurangnya tingkat korupsi, dan meningkatnya kinerja pelayanan publik serta terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan kesetaraan dan keadilan Gender, agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata;

4. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri, yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi dan komoditi unggulan daerah, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan ketersediaan kebutuhan hidup masyarakat;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal dan Berwawasan Lingkungan, yaitu mengembangkan pembangunan daerah yang memanfaatkan potensi Sumberdaya Alam disektor pertanian, pertambangan, SDA dan Pariwisata dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Perda Kabupaten Enrekang Mengenai Anggaran

Keputusan Bupati Enrekang nomor 191/KEP/IV/2017 tentang pemberian bantuan dana hiba kepada organisasi kemasyarakatan Kabupaten Enrekang tahun 2017. Sebagaimana pada ayat tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541). Adapun pada ayat ke 7 tentang peraturan daerah Kabupaten Enrekang nomor 15 tahun 2016 tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2017 (lembaran daerah Kabupaten Enrekang tahun 2016 nomor 15) dan pada ayat ke 9 tentang peraturan Bupati Enrekang nomor 56 tahun 2016 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2017 (berita daerah Kabupaten Enrekang tahun anggaran 2016 nomor 56).

B. Anggaran Putusan Daerah Kabupaten Enrekang yang Realisasi

Table V.I

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2014-2016

Uraian	Realisasi 2014 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)
A. Pendapatan			
1. Pendapatan asli daerah	52.398.764.209	53.613.410.493	92.739.563.485
2. Pendapatan transfer	786.042.272.291	864.593.294.839	975.149.855.136
3. Lain-lain pendapatan yang sah	5.628.031.198	6.054.291.529	9.853.977.822
Jumlah	845.069.067.698	924.260.996.861	1.077.743.396.443
B. Belanja Daerah			
1. Belanja Operasi	489.126.144.860	594.236.156.176	830.659.464.762
2. Belanja modal	152.911.613.904	120.856.244.770	99.857.780.515
3. Belanja tak terduga	0	892.500	0
4. Transfer	424.273.890	488.486.790	499.083.354
Jumlah belanja dan transfer	642.462.032.654	715.581.780.236	931.016.328.631
Surplus(Defisit)	202.607.035.044	281.896.928.430	146.727.077.813
C. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan pembiayaan	118.904.519.341	185.889.810.371	71.711.615.369
2. Pengeluaran Pembiayaan	32.229.617.889	31.287.502.548	30.196.616.630
Pembiayaan Netto	151.134.137.230	217.177.312.913	101.908.231.999
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SiLPA)	51.472.897.814	64.719.615.517	44.818.845.814

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014-2016

a. Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Maka dapat dilihat dari tabel laporan realisasi di atas, jumlah pendapatan selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar Rp. 845.069.067.698 sedangkan pada tahun 2015 pendapatan mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 924.260.996.861 dan pada tahun 2016 pendapatan masih mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.077.743.396.443.

b. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Dalam realisasi anggaran akuntansi Belanja mencakup beberapa pos-pos yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa belanja operasi mengalami peningkatan selama 3 tahun yaitu tahun 2014 sebesar Rp

489.126.144.860, tahun 2015 sebesar Rp. 594.236.144.860, tahun 2016 sebesar Rp. 830.659.464.762. sedangkan belanja modal mengalami penurunan selama 3 tahun yaitu tahun 2014 sebesar Rp. 152.911.613.904, tahun 2015 sebesar Rp. 120.856.244.770, tahun 2016 sebesar Rp 99.857.780.515. dan Belanja tak terduga pada pada tahun 2014 Rp. 0 (tidak ada) pada tahun 2015 Rp 892.500, tahun 2016 Rp. 0 (tidak ada). Jadi, jumlah belanja keseluruhan selama 3 tahun yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp 642.462.032.654 sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp. 765.581.780.236 dan ada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp. 931.016.328631.

c. Surplus/defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. Surplus/defisit pada tabel laporan realisasi si atas selama 3 tahun yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp 202.607.035.044 sedangkan tahun 2015 sebesar Rp. 281.896.928.430 dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 146.727.077.813. Terjadinya surplus/defisit disebabkan oleh pendapatan dan belanja daerah dimana jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah pada periode tertentu.

d. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau kan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama maksudkan untuk

menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Dari laporan realisasi anggaran di atas, dapat di rincikan jumlah pembiayaan selama pada masing-masing pembiayaan yaitu pada penerimaan pembiayaan mengalami penurunan selama 3 periode yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp. 118.904.519.341, tahun 2015 sebesar Rp.185.889.810.321, tahun 2016 sebesar Rp. 71.711.615.369. sedangkan jumlah pengeluaran pembiayaan juga ikut mengalami penurunan selama 3 tahun yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp. 32.229.617.889, pada tahun 2015 sebesar Rp. 31.287.502.548, tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 30.196.231.999 dan pada pembiayaan netto selama 3 tahun juga mengalami penuruna yaitu tahun 2014 sebesar Rp 151.134.137.230, tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 217.177.312.913 dan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 101.908.231.999.

e. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA).

Dari tabel laporan Realisasi di atas, sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran berkenaan (SILPA) terhitung selama 3 tahun yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2016 Jadi, berdasarkan perhitungan anggaran tahun anggaran berkenaan (SILPA) tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 51.472.897.814 sedangkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 64.719.615.517 dan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 44.818.845.814.

C. Sistem Pengawasan Keuangan Putusan Kabupaten Enrekang

Sistem pengawasan keuangan Kabupaten Enrekang yakni pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dimulai dari:

1. Pemeriksaan

Dalam kegiatan pemeriksaan program pengelolaan keuangan daerah di BPKD yang terdiri atas kegiatan pengelolaan administrasi pembukuan dan pelaporan, penyusunan *progress report* Kepala Daerah, penyusunan RAPBD, peningkatan sarana dan prasarana administrasi umum BPKD, pengelolaan administrasi keuangan BPKD, serta optimalisasi PAD akan diperiksa oleh BAWASDA untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Dalam kegiatan pemeriksaan ini diperlukan waktu yang relatif lama dibandingkan dengan kegiatan lain karena BAWASDA memerlukan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah untuk meyakinkan bahwa program pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dengan baik. Laporan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan kemudian akan ditindak lanjuti dalam kegiatan pengujian.

2. Pengujian

Pengujian yang dilakukan yaitu terhadap laporan hasil pemeriksaan. Dalam kegiatan ini laporan hasil pemeriksaan yang telah disertai dengan bukti akan diuji kecukupan dan relevansinya. Laporan hasil pengujian dapat bersifat positif maupun negatif. Laporan yang bersifat positif artinya dalam laporan yang

diperoleh dari hasil pemeriksaan disertai dengan bukti-bukti yang cukup relevan, diantaranya bukti hasil pengelolaan administrasi pembukuan dan pelaporan serta penyusunan *progress report* Kepala Daerah, bukti transaksi yang berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana administrasi umum BPKD, dan bukti perolehan pendapatan asli daerah dalam rangka optimalisasi PAD. Sedangkan, laporan yang bersifat negatif berarti laporan asil pemeriksaan yang diperoleh tidak disertai dengan bukti yang cukup dan relevan.

3. Penilaian

Kegiatan penilaian merupakan tindak lanjut dari tahap pengujian untuk menilai efektifitas dari program pengelolaan keuangan daerah. Dalam kegiatan ini, tidak jarang BAWASDA mengalami kesulitan dalam menentukan standar angka penilaian yang mutlak terhadap efektifitas, oleh sebab itu penilaian efektifitas pengelolaan daerah yang dilakukan BAWASDA dilihat dari tercapainya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

4. Monitoring

BAWASDA melakukan monitoring untuk menjamin kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPKD dilaksanakan dengan baik sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam evaluasi. BAWASDA melakukan kegiatan monitoring dengan mengamati atau mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di BPKD secara terus menerus dan berkelanjutan. Dengan adanya monitoring BAWASDA dapat mengetahui pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, karena BAWASDA memantau secara langsung program pengelolaan

keuangan daerah yang dilakukan BPKD.

5. Evaluasi

BAWASDA melakukan evaluasi untuk membandingkan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas kegiatan pengelolaan administrasi pembukuan dan pelaporan, penyusunan progress report Kepala Daerah, penyusunan RAPBD, peningkatan sarana dan prasarana administrasi umum BPKD, pengelolaan administrasi keuangan BPKD, serta optimalisasi PAD. Evaluasi yang dilakukan BAWASDA dilaksanakan tepat waktu, artinya bahwa kegiatan ini selalu dilakukan setelah kegiatan pemeriksaan, pengujian, penilaian, dan monitoring selesai.

D. Efektifitas Penggunaan Anggaran Kabupaten Enrekang

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel V.2

Tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Enrekang dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

Tabel V.3
Target dan Realisasi Tahun Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2014-2016

Keterangan	2014	2015	2016
Target Penerimaan PAD	106.797.728.418	99.226.820.986	154.784.434.722
Realisasi Penerimaan PAD	52.398.764.209	53.613.410.493	92.739.563.485
Biaya Pemungutan PAD	435.297.722,00	580.887.744,00	875.522.395,00
Efektifitas	49,06 %	54 ,03%	59 ,91%

Sumber: Data Diolah

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas 2014} &= \frac{52.398.764.209}{106.797.820.986} \times 100\% \\ &= 49,06 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas tahun anggaran 2014, yang dilihat tabel tarket dan realisasi anggaran PAD diatas, rasio efektifitas dihitung

dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan PAD sebesar 52.398.764.209 dengan target penerimaan PAD sebesar 106.797.728.418

Jadi, dapat diketahui bahwa rasio efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2014 dinilai tidak efektif atau kurang efektif dalam penggunaan anggaran yaitu hanya mencapai 49,06% . hal ini di sebabkan realisasi anggaran lebih kecil dari targe anggaran.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas 2015} &= \frac{53.613.410.493}{99.226.820.986} \times 100\% \\ &= 54,03\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio efektifitas tahun anggaran 2015 di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran tahun 2015 tidak efektif atau kurang efektif sama halnya pada tahun sebelumnya (2014) dimana realisasi anggaran lebih kecil yaitu 53.613.410.493 dari target anggaran yaitu 99.226.820986 yang dikalikan dengan 100% dengan hasil rasio sebesar 54,03% dalam arti rasio efektifitas tahun 2015 mengalami kenaikan di banding dengan rasio efektifitas 2014.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas 2016} &= \frac{92.739.563.485}{154.784.434.722} \times 100\% \\ &= 59,91\% \end{aligned}$$

Perhitungan rasio efektifitas tahun selanjutnya (2016) di atas, dengan menghitung perbandingan antara realisasi penerimaan PAD tahun anggaran

2016 sebesar 92.739.563.485 dan target penerimaan PAD sebesar 154.784.434.722 dengan hasil pencapai sebesar 59,91% yang artinya rasio efektifitas penggunaan anggaran tahun anggaran 2016 tidak efektif atau kurang efektif karena, realisasi anggaran lebih kecil dari target anggaran

Jadi dapat disimpulkan bahwa perhitungan rasio efektifitas di atas. dari tahun 2014-2016 tergolong tidak efektif dilihat dari tahun 2014 memiliki rasio efektifitas 49,06% , kemudian pada tahun 2015 memiliki rasio efektifitas sebesar 54,03% dan pada tahun 2016 memiliki rasio efektifitas 59,91% karena dari tahun . 2014-2016 realisasi anggaran lebih kecil dari target anggaran.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di simpulkan bahwa analisis pengawasan keuangan terhadap efektifitas penggunaan anggaran pada kantor bupati Enrekang dalam merealisasikan pendapatan asli daerah kabupaten Enrekang tergolong efektif dilihat dari tiga tahun terakhir semakin menurun tingkat pengawasan keuangan terhadap efektifitas penggunaan anggaran yakni pada tahun 2014 memiliki rasio efektifitas 49,06% , kemudian pada tahun 2015 memiliki rasio efektifitas sebesar 54,03% dan pada tahun 2016 memiliki rasio efektifitas 59,91% .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, diatas mengenai pengawasan keuangan terhadap efektifitas penggunaan anggaran pada kantor Bupati Enrekang, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan kepada Kantor Bupati Enrekang yaitu hendaknya lebih meningkatkan lagi pengawasan keuangan terhadap efektifitas penggunaan anggaran sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu bagi kantor Bupati Enrekang untuk mencapai pelaksanaan anggaran serta terus berusah untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan dan anggaran yang direncanakan lebih mengarah pada kepentingan masyarakat luas agar masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang telah diberikan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya serta dapat menjadi informasi yang relevan bagi pemakainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Dua*, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.
- Diharna, H.2009. *Pemeriksaan dalam Pengawasan*. Inspektorat Wilayah Jawa Barat
- Gunawan, Adisapoetra dan Marwan, Asri, 2006, *Anggaran Perusahaan*, Edisi Revisi, Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 2009. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Hasil dan Paglaykim, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Hartanto, D, 2009, *Akuntansi Untuk Usahawan*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Yogyakarta.
- Horngen, Charles, 2007, *Cost Accounting*, Alih Bahasa Mohammad Badjuri dan Kusnaedi, Jilid Pertama Edisi Keenam, penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2010, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Cetakan Kedua, Andy, Yogyakarta.
- Mulyono, Teguh, Pajo , 2009, *Analisis dan Disain Sistem Informasi*, Cetakan Pertama, Edisi Kelima, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2007, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andy, Yogyakarta.
- Ray H. Garisson, 2008, *Akuntansi Pemerintahan*, Edisi Ketiga, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
- Syafaruddin, 2010, *Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Susilo, Martoyo, 2007, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Cetakan Ketiga, Edisi Ketiga, Penerbit STIE-YKPN, Yogyakarta.

Sujamto, 1987. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sujamto. 1996. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widjaya, Haw, 2009, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

RIWAYAT HIDUP



Nuralam Tawi, lahir di Manggugu pada Tanggal 08 Mei 1992, anak pertama dari 10 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda “Tawi” dan Ibunda “Suriana”.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di (SD) Sekolah Dasar pada SD Negeri 65 Tampo pada tahun 1999 dan selesai pada tahun 2005; dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di (SMP) Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Anggeraja dan selesai pada Tahun 2008; dan pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di (SMA) Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Anggeraja Penulis mengambil Jurusan IPS dan selesai pada tahun 2011; pada tahun 2011 Penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Alhamdulillah selesai tahun 2018.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai doa dan kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Analisis Pengawasan Keuangan Terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran Pada Kantor Bupati Enrekang”.